
OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH SEBAGAI FASILITATOR; KATALISATOR; REGULATOR DAN PEMAHAMAN KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN UMKM DI KOTA SUKABUMI

Rizal Zaelani¹; Hana Sujana²; Muhammad Zaky³
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi, Indonesia^{1,2,3}
Email: berial.zaelani@gmail.com¹; hssujana63@gmail.com²;
zaky86muhammad@gmail.com³

ABSTRAK

Untuk mengembangkan UMKM sebagai bisnis yang sangat strategis dalam kesuksesan ekonomi bahkan menjadi pilar perekonomian nasional yang mendistribusikan penyerapan lapangan kerja, pendapatan yang rata dan sebagai sarana sosial ekonomi masyarakat. Maka salah satu cara mengembangkan UMKM tersebut para pelaku UMKM harus mampu mengoptimalkan peran pemerintah juga mampu memahami literasi keuangan syariah, dimana dengan literasi ini dapat membantu para pelaku dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk mengembangkan usahanya untuk lebih berkembang dan mandiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah peran pemerintah sbagai fasilitator;katalisator; dan regulator serta pemahamann literasi keuangan syariah memberikan kontribusi dalam mengembangkan UMKM yang ada di Kota Sukabumi. Untuk mengetahui tujuan penelitian ini maka peneliti memakai analisis asosiatif kausalitas. Populasi research ini adalah Pelaku UMKM di Sukabumi kota yng mengajukan Bantuan Pemerintah Usaha Mikro sebanyak 80.000, sampelnya ditentukan dengan rumus Slovin sebanyak 398 responden. Penarikan sampelnya dengan Teknik random sampling. Analisis multiavariate regression digunakan untuk menguji kualitas data, uji prasyarat dan analisis data serta pengujian hipotesis Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sbagai sebagai fasilitator;katalisator;regulator dan pemahaman literasi keuangan syariah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam mengembangkan UMKM yang ada di Sukabumi Kota.

Kata kunci : Fasilitator; Katalisator; Regulator; Literasi keuangan syariah; Pengembangan UMKM

ABSTRACT

To develop MSMEs as a very strategic business in economic success and even become a pillar of the national economy that distributes employment absorption, equal income, and as a means of socio-economic community. So one way to develop MSMEs is that MSME actors must be able to optimize the role of the government and be able to understand Islamic financial literacy, where Islamic financial literacy can help actors think, behave and act to develop their businesses to be more developed and independent. The purpose of this research isto determine whether the role of the government as a facilitator, catalyst, and regulator; as well as understanding of Islamic financial literacy contributes to the development of MSMEs in Sukabumi City. To determine the purpose of this research, the researchers used causal associative analysis. The populations of this research is MSME actors in the city of Sukabummi who apply for Government Assistance for Micro Enterprises as many as 80,000, the sample is determined by the Slovin formula as many as 398 respondents. Sampling with random

sampling technique. Multivariate regression analysis was used to test data quality, prerequisite test, and data analysis as well as hypothesis testing. The results of this research indicate that government's role as a facilitator; catalyst, regulator; and understanding of Islamic financial literacy has made an extraordinary contribution to developing MSMEs in Sukabumi City.

Keywords : Facilitator; Catalyst; Regulators; Islamic financial literacy; Develop MSMEs

PENDAHULUAN

Usaha UMKM pada masa pandemic covid-19 menjadi sebuah trend positif dalam membantu pemerintah khususnya dalam memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan pendapatan domestic bruto dan UMKM juga secara tidak langsung dapat memberi ruang lapangan kerja bagi masyarakat. Sehingga tidak dipungkiri lagi demi menumbuhkembangkan usaha dalam ranah memajukan perekonomian secara nasional yang bersandar pada demokrasi ekonomi yang adil, UMKM-lah yang sangat realistis, buktinya pada masa pandemic covid-19 pun UMKM tetap eksis dan bertahan serta bersaing.

Perkembangan UMKM di Sukabumi Kota cukup berkembang pesat dari segi jumlah pelakunya, hal ini ditunjukkan dengan data yang diperoleh bahwa pelaku UMKM yang ada di wilayah Sukabumi kota yang asalnya berjumlah 8.745 dan bersumberkan hasil pendataan Bantuan Pemerintah Usaha Mikro (BPUM) kini ternyata naik hampir 80 ribu (Republika.co.id, 2021). Dari data tersebut terdapat kenaikan yang signifikan dari segi jumlah pelaku UMKM. Namun dalam realitasnya dari data tersebut menggambarkan adanya permasalahan yang dialami pelaku UMKM yaitu permasalahan dalam pembiayaan dan manajemen keuangan sehingga banyak pelaku UMKM yang hadir dadakan untuk mendapatkan modal bantuan dari pemerintah. Diperkuat lagi dengan data OJK bahwa dari total UMKM mengalami kesulitan dalam hal permodalan sekitar 70% dikarenakan dalam pencarian dana pelaku UMKM sulit melengkapi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan secara formal serta berdasarkan hasil survey literasi dan inklusi keuangan secara nasional 2019 skema literasi keuangan=38,03%. (Yolanda Iqnatia, Nurmatias, 2021).

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa peran pemerintah belum optimal diduga peran pemerintah masih berperan secara parsial sebagai Fasilitator saja, sebagai katalisator saja atau hanya sebagai regulator saja. Selanjutnya data di atas juga menggambarkan bahwa masyarakat Kota Sukabumi mengenai karakteristik dari produk

maupun pelayanan jasa keuangan yang diajukan Lembaga jasa keuangan secara formal belum memahami sepenuhnya. Sehingga para UMKM kesulitan mengakses dan memperoleh modal usahanya, maka ketika ada bantuan dari pemerintah masyarakat serta merta mengajukan permohonan bantuan dana pemerintah ke setiap kelurahannya dan menjadi permasalahan baru bagi pemerintah setempat dalam mengatasi gejolak yang terjadi di masyarakat seperti adanya kecemburuan sosial kenapa si A mendapat bantuan padahal usahanya fiktif. sedangkan seseorang memiliki usaha yang real tidak mendapat bantuan.

Untuk mengembangkan UMKM yang bertujuan untuk menciptakan perekonomian nasional bersandar pada demokrasi ekonomi yang adil. Oleh karena itu butuh energi dalam pengoptimalan peran pemerintah yang komprehensif yaitu peran pemerintah harus berperan sebagai fasilitator, katalisator bahkan harus berperan sebagai regulator selain peran pemerintah yang optimal juga harus adanya pemahaman literasi keuangan syariah dari sisi pelaku UMKMnya yang dimana literasi keuangan syariah ini merupakan keterampilan yang sangat penting dalam memberdayakan masyarakat terlebih dalam mengelola atau mengembangkan usaha UMKM nya. sehingga dengan adanya peran pemerintah yang optimal dan pemahaman literasi keuangan syariah yang baik pengembangan UMKM yang ada di Kota Sukabumi semakin berkembang secara mandiri tanpa ketergantungan dari bantuan dari pemerintah.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah diharapkan dengan adanya peran pemerintah sebagai fasilitator; katalisator; regulator dan pemahaman literasi keuangan syariah memberikan dampak positif yang luar biasa dalam mengembangkan UMKM yang ada di Sukabumi kota.

Urgensi research ini adalah supaya UMKM yang ada di Sukabumi Kota tidak mengalami kesulitan dalam permodalan usahanya dan memiliki mitra dalam berbisnis sehingga usahanya bertahan dan terus berkembang.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mengupgrade kemampuan individu dalam konseptual, kajian teori, strategi, dan akhlak yang selaras dengan kepentingan usaha atau tanggung jawab melalui DIKLAT (Yolanda Iqnatia, Nurmatias, 2021). Pengembangan UMKM adalah suatu ikhtiar pemerintah, Pemda,

dunia bisnis dan masyarakat yang dilakukan untuk menggerakkan UMKM melalui sarana pendampingan dan bantuan yang diberikan untuk memperkuat dan menumbuhkembangkan kreatifitas dan daya saing UMKM secara kualitas maupun kuantitas . (Putra, 2015), (Prastika, 2017)

Indikator pengembangan UMKM dalam penelitian ini (Yolanda Iqnatia, Nurmatias, 2021), adalah: pasar, teknologi dan inovasi , permodalan dan manajemen

Peran Pemerintah

Peran pemerintah diupayakan harus mampu menjalankan proses pembangunan yang dapat meningkatkan produktifitas ekonomi demi terwujudnya masyarakat semakin sejahtera. (Riska Firdaus, 2020) dan peran pemerintah itu harus dapat memanifestasikan landasan dalam kewirausahaan di sebuah negara dapat terwujud. (Yolanda Iqnatia, Nurmatias, 2021)

Peran pemerintah dalam pembangunan UMKM ini dapat diaktualkan (Putra, 2015), (Nirwana et al., 2017), (Prastika, 2017), (Gandhiadi et al., 2018) dan (Yolanda Iqnatia, Nurmatias, 2021) sebagai :

1. Fasilitator (Membantu UMKM dalam kegiatan pelatihan-kewirausahaan)
2. Katalisator (Membantu UMKM dalam pemberdayaan &-permodalan yang efektif)
3. Regulator (Membantu UMKM dalam kebijakan yg memudahkan usaha untuk berkembang dan berkreaitif dalam investasi.

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah selaku Fasilitator, yakni mewujudkan suasana atau atmosfer yang kondusif dalam merealisasi pembangunan (sebagai pihak yang mempertemukan kepentingan dalam pembangunan daerah secara optimal).(Riska Firdaus, 2020)

Adapun dalam research ini yang merupakan indikator peran pemerintah sebagai fasilitator ialah sebagai berikut : (Riska Firdaus, 2020) :

1. Menyediakan sarana dan prasarana
2. Memberikan modal kepada kelompok UMKM
3. Membantu menyediakan pendidikan dan pelatihan kepada kelompok UMKM
4. Memberikan penyuluhan dan pendampingan
5. Memberikan keterampilan secara teknis

Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Peran pemerintah selaku katalisator, ialah di mana pemerintah berperan selaku agen dalam akselerasi peningkatan daerah yang berpotensi yang akan menjadi bentuk sosial dalam pembangunan partisipasi. (Arif dalam Nurdin, 2014) dalam (Riska Firdaus, 2020)

Indikator dalam pengukuran peran pemerintah sebagai katalisator ialah sebagai berikut :

1. Menanggapi berbagai keluhan pelaku UMKM
2. Melakukan koordinasi dengan semua pihak
3. Kemampuan penyuluh dalam pendampingan pada kelompok UMKM
4. Kinerja pendamping kelompok UMKM sangat memuaskan bagi kelompok UMKM
5. Mengembangkan sistem dan sarana pemasaran hasil usaha UMKM

Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah selaku regulator ialah pemerintah merancang kerangka acuan pedoman dalam menyeimbangkan pengelolaan pembangunan (membuat aturan-aturan dalam rangka dalam pembangunan bisa berjalan efektif baik secara administrasi maupun secara operasional). (Riska Firdaus, 2020)

Indikator dalam pengukuran peran pemerintah sebagai regulator ialah sebagai berikut :

1. Membuat kebijakan dalam hal pemberdayaan pelaku UMKM
2. Mampu menyediakan kebutuhan kelompok UMKM
3. Produktivitas usaha UMKM dapat meningkat
4. Mampu Mengatasi permasalahan pelaku UMKM
5. Mampu meningkatkan mutu dan kualitas hasil usaha UMKM

Literasi Keuangan Syariah

Secara konseptual literasi keuangansyariah terbentuk dengan adanya pengetahuan, kecakapan menguasai konsep keuangan, ahli mengatur keuangan secara personal/pribadi atau secara konsep perusahaan, dan memiliki kecakapan pengambilan putusan dalam kondisi spesifik yang berkaitan dengan keuangan menurut asas-asas syariah islam. (Djuwita & Yusuf, 2018) (Muhammad Akbar, Misbahuddin, 2021) (Adiyanto & Purnomo, 2021)

Sedangkan pada rangka peningkatan literasi keuangan syariah tidak hanya dipahami oleh masyarakat dalam hal produk dan jasa keuangan syariah melainkan harus bisa membentuk pola pikir, pola tindak dan pola tindak masyarakat dalam mengatur

keuangan secara syar'i agar tingkat kesejahteraan di masyarakat lebih optimal (Subardi & Indri Yuliafitri, 2019) (Adiyanto & Purnomo, 2021)

Indikator pemahaman Literasi Keuangan Syariah pada kegiatan penelitian yang dilakukan ini (Adiyanto & Purnomo, 2021) adalah : Pemahaman keuangan secara dasar, Pemahaman hal pembiayaan, Pemahaman hal Investasi dan Pemahaman hal Asuransi Berdasarkan permasalahan dan tinjauan pustaka maka konseptual reserch bisa ditinjau di gambar no.1.

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator berkontribusi pada Pengembangan UMKM

Sebagai fasilitator, pemerintah mempunyai peran dalam memudahkan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya seperti dalam bidang produksi, dimana tugas sebagai fasilitator memberikan pelatihan agar UMKM memiliki kemampuan berbagai kemampuan, memberikan akses kemudahan dana untuk usaha, memberikan keistimaaan keringanan perijinan dalam waktu lintas hukum, dan memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaan lainya dalam memudahkan pengembangan UMKM. (Putra, 2015). Menurut temuan penelitian (Nirwana et al., 2017) menyatakan bahwa pemerintah berperan selaku fasilitator mempunyai peran yang baik dlam pembinaan UMKM. Sedangkan penelitian oleh (Riska Firdaus, 2020) menyatakan peran pemerintah selaku fasilitator mempunyai peran yang cukup baik dalam pemberdayaan petani .

H1 : Peran Pemerintah sebagai -Fasilitator memiliki kontribusi pada pengembangan UMKM

Peran Pemerintah sebagai Katalisator berkontribusi pada Pengembangan UMKM

Sebagai katalisator, pemerintah harus mampu memberikan energi pada pelaku UMKM untuk bereaksi cepat dalam pengembangan usahanya. Sehingga disini para pelaku UMKM harapan pemerintah harus mampu mempunyai jiwa kewirausahaan dan mentransformasi usahanya lebih berkembang besar. Sehingga peran pemerintah sebagai katalisator dituntut harus terlibat dalam prosesnya bukan keterlibatan dalam keluruhan kegiatan UMKM.(Nirwana et al., 2017) Dalam perannya sebagai katalisator pihak pemerintah harus mengadakan variasi kosnep dan program seperti program pemberdayaan masyarakat yang kreatif untuk lebih produktif bukan untuk konsumtif, program penghargaan terhadap UMKM, penyedia sarana prasarana yang bersifat intelek bagi UMKM (perlindungan HAKI) dan pendanaan termasuk modal yang bisa digulirkan.(Putra, 2015). Menurut temuan penelitian(Putra, 2015) membuktikan peran

pemerintah selaku katalisator mempunyai peran yang baik dalam mengembangkan UMKM. Dan menurut penelitian (Nirwana et al., 2017) bahwa peran katalisator memiliki peran penting dalam memfasilitasi UMKM.

H2 : Peran Pemerintah sebagai Katalisator memiliki kontribusi pada pengembangan UMKM

Peran Pemerintah sebagai Regulator berkontribusi pada Pengembangan UMKM

Selaku regulator, pihak pemerintah harus mampu melahirkan kebijakan yang berpihak pada pelaku UMKM untuk memudahkan dan mengembangkan bisnisnya, seperti menjaga situasi ekonomi yang kondusif untuk melakukan investasi, mengelola tingkat Suku Bunga (SBI) tetap stabil dan menciptakan keputusan yang mengatur etika usaha dalam bersaing, dengan kebijakan itu tentunya agar kegiatan ekonomi bagi pelaku UMKM dapat berjalan baik dan dinamis.(Putra, 2015). Menurut temuan dari penelitian oleh (Riska Firdaus, 2020) menyatakan bahwa peran pemerintah selaku regulator mempunyai peran yang baik dalam pemberdayaan petani. Sedangkan (Prastika, 2017) pihak pemerintah sudah sesuai dengan perannya selaku regulator dalam upaya pengembangan kerajinan kulit.

H3: Peran Pemerintah sebagai Regulator memiliki kontribusi pada pengembangan UMKM.

Literasi Keuangan Syariah berkontribusi pada Pengembangan UMKM

Dengan memiliki pemahaman literasi keuangan yang syariah dengan baik, pelaku UMKM harus mampu membuat dan menjalankan perencanaan manajemen yang telah diputuskan dan mampu menggunakan keuangan secara tepat guna menumbuhkembangkan UMKM.(Djuwita & Yusuf, 2018). Menurut temuan penelitian oleh (Muhammad Akbar, Misbahuddin, 2021) bahwa literasi keuangan-syariah memiliki dampak pada kinerja usaha kecil kuliner. Sedangkan Adiyanto & Purnomo, (2021) menerangkan literasi keuangan syariah mempunyai dampak positif pada minat responden dalam memakai produk bank secara syariah. Namun temuan lain dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yolanda Iqnatia, Nurmatias, 2021) literasi keuangan tidak berdampak signifikan pada perkembangan usaha

H4: Literasi Keuangan Syariah memiliki dampak pada pengembangan UMKM

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator; katalisator; regulator dan literasi keuangan syariah secara bersamaan memiliki dampak pada pengembangan UMKM

Untuk memiliki kemandirian dalam usahanya para pelaku UMKM dituntut untuk terus mengoptimalkan peran pemerintah baik sebagai fasilitator, katalisator, regulator agar mereka mampu membangun kemitraan dalam berbisnis kemudian para pelaku UMUM juga dituntut untuk terus memiliki pemahaman literasi keuangan syariah agar mereka mampu mencari dana serta mengelola dananya secara mandiri sehingga usaha UMKM nya berjalan sukses dan berkembang. Penelitian ini merupakan keterbaruan karena penelitian-penelitian sebelumnya, hasilnya belum menemukan dugaan adanya pengaruh secara bersamaan antara peran pemerintah baik selaku fasilitator;katalisator;regulator dan literasi keuangan syariah pada pengembangan UMKM. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak secara bersamaan antara semua variabel tersebut.

H5 : Fasilitator, katalisator, regulator dan literasi keuangan syariah secara bersamaan memiliki dampak pada pengembangan UMKM

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020). Analisis asosiatif kausalitas yang digunakan dalam penelitian ini dimana metode ini dimaksudkan untuk mengungkapkan hubungan antara peran pemerintah selaku fasilitator; katalisator; regulator dan literasi keuangan syariah terhadap pengembangan UMKM di Sukabumi Kota sehingga ringkasan penelitian akan mengidentifikasi gambaran secara jelas tentang objek yang diteliti.

Populasi penelitian ini yaitu para pelaku UMKM yang mengajukan Bantuan Pemerintah Usaha Mikro (BPUM) di kota Sukabumi sebanyak 80.000 orang. Ukuran sampel ditentukan dengan ambang batas kebenaran 95% dengan menggunakan slovin, sehingga jumlah sampelnya sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{80.000}{1 + 80.000(0.05)^2} = \frac{80.000}{201} = 398 \text{ responden}$$

Adapun dalam menarik sampelnya peneliti memakai Random Sampling dan Sumber data primer dari perwakilan koperasi dikumpulkan melalui kuesioner, Sekala ukur yang dipakai ialah sekala likert untk menguji indikator variabel. Pemeriksaan

instrument dilakukan dengan melakukan validitas dan reliabilitas pada data yang terkumpul, dilanjutkan dengan uji asumsi yang berlaku sedangkan untuk mengetahui dampak peran pemerintah sebagai fasilitator; katalisator; regulator dan pemahaman literasi keuangan syariah terhadap pengembangan UMKM menggunakan analisis multivariate regression.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden Penelitian

Responden research ini yakni pelaku UMKM laki-laki paling banyak 209 orang (53%) dari Wanita 189 orang(47%). Pelaku UMKM yang berumur di bawah 30 tahun paling banyak 156 orang (39%), diantara 30-40 tahun 111 orang(28%), 41-50 tahun 98 orang (25%) dan yang beumur di atas 50 tahun 33 orang (8%). Pelaku UMKM yang berpendidikan SMA paling banyak 198 orang (50%), SMP 41 orang (10%), D3 63 orang (16%) dan berpendidikan S1 96 orang (24%), sedangkan menurut jenis usaha para pelaku UMKM paling banyak bergelut dalam bidang makanan dan minum sebanyak 146 orang (37%), rumah makan 68 orang(17%), kerajinan 8 orang (2%), Bengkel 24 orang (6%), Pedagang Eceran 101 orang (25%), Penjahit 15 orang (4%), Percetakan 19 orang(5%) dan dalam bidang usaha salon 17 orang (4%).

Hasil Uji Kualitas Data

Bersumber pada tabel 1,2,3,4 bahwa seluruh variabel yang diteliti disampaikan hasilnya valid sebab nilai $r_{hitungnya} > r_{kritis} = (0.300)$. dan hasil uji reliabilitasnya segenap variabel yang diteliti dinyatakan reliabel karena α nya lebih besar dari 0.60, hasilnya tertera pada tabel 6. maka jawaban semua responden konsisten. Maka data penelitian ini dilanjut pada tahap pengujian uji prasyarat.

Hasil Uji Prasyarat

Bersumber pada tabel 7, nilai signifikansi= $0.116 > 0.05$, sehingga bisa disampaikan data ini berdistribusi normal. Sedangkan hasil linearitasnya yang tertera pada tabel 8,9,10 dan 11 bisa diungkap bahwa keempat variabel (Fas, Kat, Reg dan LKSy) dinyatakan memiliki hubungan yang linear pada pengembangan UMKM karena memiliki nilai Sig linearitynya = $0.000 < 0.05$. dan untuk hasil heteroskedastisitas pada tabel 12, dapat disampaikan bahwa hasilnya tidak terjadi heteroskedastisitas pada pengembangan UMKM karena nilai Sign variabel Fas=0.183, Kat=0.117, Reg=0.129 dan LKSy=0.536 hasil ini > 0.05 . kemudian untuk hasil multikolinearitas yang terdapat

pada tabel 13, dapat disimpulkan bahwa hasilnya tidak terjadi multikolinearitas karena keemat variabel nilai tolerancenya memiliki nilai tolerancenya >0.1 dan nilai V-I-P nya <10 . Sehingga dapat diringkas bahwa data ini memehuni kriteria untuk dilanjutkan ke tahap pengujian analisis data dan hipotesis.

Hasil Analisis Data

Bersumber tabel-14. didapat mpersamaan regresi-bergandanya :

$$P\text{-SDM} = 4.967 + 0.143(\text{Fas}) + 0.174(\text{Kat}) + 0.106(\text{Reg}) + 0.170(\text{LKSy})$$

Berikut penjabarannya:

1. Nilai Konstanta $=4.967$, dimana jika peran pemerintah sebagai fasilitator;Katalisator; Regulator dan Literasi keuangan syariah tidak ada nilainya, maka pengembangan UMKM akan tetap $= 4.967$.
2. Nilai koefisien regresi dari peran pemerintah sebagai fasilitator yakni $=0.143$. maksudnya dimana tingkat peran pemerintah sebagai fasilitator naik 1 poin maka pengembangan UMKM akan naik juga $=0.143$.
3. Nilai koefisien regresi dari peran pemerintah sebagai katalisator yakni $= 0.174$. maksudnya dimana tingkat peran pemerintah sebagai katalisator naik 1 poin maka pengembangan UMKM akan naik juga $=0.174$.
4. Nilai koefisien regresi dari peran pemerintah sebagai regulator yakni $=0.106$. maksudnya dimana tingkat peran pemerintah sebagai regulator naik 1 poin maka pengembangan UMKM akan naik juga $=0.106$.
5. Nilai koefisien regresi dari literasi keuangan syraiah yakni $=0.170$. maksudnya dimana tingkat literasi keuangan syraiah naik 1 poin maka pengembangan UMKM akan naik juga $=0.170$.

Kemudian pada tabel 15. Didapati hasil koefisien-determinasi memiliki point adjusted_R_Square $=0.270 / (27\%)$ maka dapat diungkap peran pemerintah sebagai fasilitator;katalisator;regulator dan literasi keuangan syariah memiliki kontribusi sebanyak 27%, selebihnya 73% oleh peneliti faktor lainnya tidak diteliti.

Hasil Uji Hipotesis

Bersumber pada tabel 16, hasil hipotesis secara parsial bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama diterima karena peran pemerintah sebagai fasilitator memberikan dampak yang luar biasa pada pengembangan UMKM, ini dipastikan sama hasil $t_{hitung}(3.689) > t_{tabel}(1.966)$ disertai nilai sign nya $0.000 < 0.05$.
2. Hipotesis kedua diterima karena peran pemerintah sebagai katalisator memberikan dampak yang luar biasa pada pengembangan UMKM, ini dipastikan sama hasil $t_{hitung}(3.610) > t_{tabel}(1.966)$ disertai nilai sign nya $0.000 < 0.05$.
3. Hipotesis ketiga diterima karena peran pemerintah sebagai regulator memberikan dampak yang luar biasa pada pengembangan UMKM, ini dipastikan sama hasil $t_{hitung}(2.489) > t_{tabel}(1.966)$ disertai nilai sign nya $0.013 < 0.05$.
4. Hipotesis keempat diterima karena literasi keuangan syariah juga memberikan dampak yang luar biasa pada pengembangan UMKM, ini dipastikan sama hasil $t_{hitung}(2.758) > t_{tabel}(1.966)$ disertai nilai sign nya $0.006 < 0.05$.

Sedangkan bersumber pada tabel 17, hasil hipotesis secara bersamaan bisa diinterpretasikan sebagai berikut : dimana hipotesis yang kelima ini diterima karena baik peran pemerintah sebagai fasilitator; katalisator, maupun sebagai regulator dan literasi-keuangan secara syariah secara bersamaan memberikan kontribusi yang luar biasa pada pengembangan UMKM.

Secara parsial hasil penelitian ini memperkuat temuan dari (Putra, 2015) membuktikan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator, katalisator, dan regulator masing-masing memiliki peran yang baik dalam mengembangkan UMKM. Dan temuan dari (Yolanda Iqnatia, Nurmatias, 2021) hasilnya bertolak belakang sedangkan dengan temuan dari (Muhammad Akbar, Misbahuddin, 2021) sejalan bahwa literasi keuangan syariah memberikan peranan yang penting dalam pengembangan usaha kuliner.

KESIMPULAN

Peran pemerintah sebagai fasilitator, katalisator, regulator dan literasi keuangan syariah baik secara mandiri maupun bersamaan memberikan dampak yang baik terhadap pengembangan UMKM. Sehingga dalam meningkatkan UMKM ini para pelaku UMKM yang ada di Sukabumi harus mampu mengoptimalkan peran pemerintah supaya mendapat kemudahan akses dan bermitra dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu juga para pelaku UMKM harus menguasai pemahaman keuangan literasi berbasis syariah karena dengan pemahaman tentang literasi tersebut para UMKM diharapkan

mampu manage konsep keuangan secara mandiri dan akuntabilitas sehingga usahanya digeluti maju dan berkembang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengungkapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyak pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi LLDIKTI IV atas supportnya, kepada team Pusat Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat STIE PGRI Sukabumi yang memberikan bantuan dan sarannya serta kepada mahasiswa yang telah menolong penyebaran kuesioner research ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, M. R., & Purnomo, A. S. D. (2021). Dampak Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Administrasi ...*, 9(1), 1–12. <http://www.ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JAK/article/view/1461>
- Amien, NN., Zulkarnaen, W. (2022). The Role Of Sharia Banking On Msmes That Implied On Indonesian Economic Growth. Vol 3 (1). 29-35. DOI: <https://doi.org/10.15575/jim.v3i1.19557>.
- Djuwita, D., & Yusuf, A. A. (2018). Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 105. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2837>
- Gandhiadi, G. K., Dharmawan, K., & Kencana, I. P. E. N. (2018). Peran Pemerintah, Modal Sosial, dan Kinerja Usaha Terhadap Kesejahteraan Subjektif Pelaku Industri Tenun di Kabupaten Jembrana, Bali. *Jurnal Matematika*, 8(1), 26. <https://doi.org/10.24843/jmat.2018.v08.i01.p95>
- Muhammad Akbar, Misbahuddin, A. W. (2021). PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN PERILAKU KEWIRAUSAHAAN MUSLIM TERHADAP KINERJA USAHA KECIL (STUDI PADA USAHA KULINER DI KOTA MAKASSAR). *Asy-Syarikah (Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 25–39.
- Nirwana, D. C., Muhammadiyah, M., & Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 01. <https://doi.org/10.26618/kjap.v3i1.890>
- Prastika, H. C. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah(Umkm) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan. *Fisip*, 1–12.
- Putra, T. G. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(April), 1–10.
- Republika.co.id. (2021). Pandemi, UMKM di Sukabumi Tambah Jadi 80 Ribu Unit. *Republika.Co.Id*. <https://repjabar.republika.co.id/berita/r057ks457/pandemi-umkm-di-sukabumi-tambah-jadi-80-ribu-unit>
- Riska Firdaus. (2020). PERAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI REGULATOR, DINAMISATOR, FASILITATOR, DAN KATALISATOR DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KAKAO DI KABUPATEN LUWU UTARA Riska.

Jurnal I La Galigo / Public Administration Journal, 3(1), 61–71.

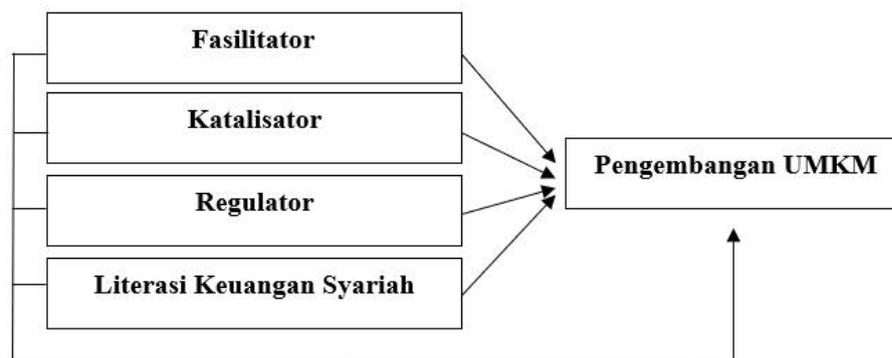
Subardi, H. M. P., & Indri Yuliafitri. (2019). EFEKTIVITAS GERAKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGEDUKASI MASYARAKAT MEMAHAMI PRODUK KEUANGAN SYARIAH. *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 5(1), 31–44.

Wiratna, S. V. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Yolanda Iqnatia, Nurmatias, D. C. P. (2021). PENGARUH LITERASI KEUANGAN, INOVASI, DAN PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH. *E-Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 9(2013), 213–228.

Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR DAN TABEL



Gambar 1. Model Konseptual

Tabel 1. Hasil-Uji-Validitas Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Item	r-hitung	r-kritis
Fas1	0.815	0.300
Fas2	0.827	0.300
Fas3	0.840	0.300
Fas4	0.751	0.300
Fas5	0.749	0.300

Sumber: Ouput-SPSS26

Tabel 2. Hasil-Uji-Validitas Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Item	r-hitung	r-kritis
Kat1	0.723	0.300
Kat2	0.696	0.300
Kat3	0.706	0.300
Kat4	0.772	0.300
Kat5	0.691	0.300

Sumber: Ouput-SPSS26

Tabel 3. Hasil-Uji-Validitas Peran Pemerintah sebagai Regulator

Item	r-hitung	r-kritis
Reg1	0.716	0.300
Reg2	0.618	0.300
Reg3	0.713	0.300
Reg4	0.695	0.300
Reg5	0.500	0.300

Sumber: Ouput-SPSS26

Tabel 4. Hasil_Uji-Validitas Literasi_Keuangan_Syariah

Item	r-hitung	r-kritis
LKSy1	0.693	0.300
LKSy2	0.796	0.300
LKSy3	0.677	0.300
LKSy4	0.692	0.300

Sumber: Ouput-SPSS26

Tabel 5. Hasil-Uji-Validitas Pengembangan UMKM

Item	r-hitung	r-kritis
P-UMKM1	0.746	0.300
P-UMKM2	0.752	0.300
P-UMKM3	0.732	0.300
P-UMKM4	0.662	0.300

Sumber: Ouput-SPSS26

Tabel 6. Hasil-Ujje-Reliabilias

Variabel	Nilai Alpha Cronbachs
Fas	0.847
Kat	0.765
Reg	0.636
LKSy	0.682
P-UMKM	0.694

Sumber: Ouput-SPSS26

Tabel 7. Hasil-Ujje-Normalitas

	Untandardized Rsidual	
N	398	
Normal Paramters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std.Deviation	1.42038540
Most Extreme Differences	Absolut	.041
	Positif	.024
	Negatif	-.041
Test Statistik	.041	
Asymp.Sig(2-tailed)	.116 ^c	

Sumber: Ouput-SPSS26

Tabel 8. Hasil-Uji-Linieritas Fasilitator pada Pengembangan UMKM

			Sig.
P-UMKM * Fasilitator	Between Grups	(Combined)	.000
		Linearity	.000
		Deviation from Linearity	.000
Within Groups			
Total			

Sumber: Ouput-SPSS26

Tabel 9. Hasil-Uji-Linieritas Katalisator pada Pengembangan UMKM

			Sig.
P-UMKM * Katalisator	Between Grups	(Combined)	.000
		Linearity	.000
		Deviation frm Linearity	.000
Within Groups			
Total			

Sumber: Ouput-SPSS26

Tabel 10. Hasil-Uji-Linieritas Regulator pada Pengembangan UMKM

			Sig.
P-UMKM * Regulator	Between Grups	(Combined)	.000
		Linearity	.000
		Deviation frm Linearity	.299
Within Groups			
Total			

Sumber: Ouput-SPSS26

Tabel 11. Hasil-Uji-Linieritas Lineritas pada Pengembangan UMKM

			Sig.
Pengembang n UMKM * Literasi keuangan Syariah	Between Grups	(Combined)	.000
		Linearity	.000
		Deviation frm Linearity	.000
Within Groups			
Total			

Sumber: Ouput-SPSS26

Tabel 12. Hasil-Uji-Heteroskedastisitas

Model	t	Sig.
1 (Constant)	1.823	.069
Fasilitator	-1.333	.183
Katalisator	1.569	.117
Regulator	-1.521	.129
Literasi keuangan Syariah	.620	.536

Sumber: Ouput-SPSS26

Tabel 13. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Colinearity Statistics	
	Tolerance	V.I.F
1 Fasilitator	.643	1.554
Katalisator	.541	1.847
Regulator	.644	1.552
Literasi keuangan Syariah	.568	1.762

a. Dependent Variable: Pengembangan UMKM

Sumber : Ouput-SPSS26

Tabel 14. Hasil Uji Analisa-Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	4.967	1.002
Fasilitator	.143	.039
Katalisator	.174	.048
Regulator	.106	.043
Literasi keuangan Syariah	.170	.062

Sumber : Ouput-SPSS26

Tabel 15. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.527 ^a	.278	.270	1.42760

a. Predictors: (Constant), Literasi keuangan Syariah, Regulator, Fasilitator, Katalisator

b. Dependent Variable: Pengembangan UMKM

Sumber : Ouput-SPSS26

Tabel 16. Hasil Uji t-Hitung (Parsial)

Model	t	Sig.
1 (Constant)	4.957	.000
Fasilitator	3.689	.000
Katalisator	3.610	.000
Regulator	2.489	.013
Literasi keuangan Syariah	2.758	.006

a. Dependent Variable: Pengembangan UMKM

Sumber : Ouput-SPSS26

Tabel 17. Hasil Uji-F-hitung (Simultan)

Model	F	Sig.
1 Regression	37.736	.000 ^b
Residual		
Total		

Sumber : Ouput-SPSS26